JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI SAMUDRA (JMAS)
Volume 4 Nomor 5, OKTOBER 2023. HALAMAN 287-301

e- ISSN : 27970086
p- ISSN : 27970434

PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi pada Kabupaten Aceh Tamiang)

Ayu Rohanda[a], , Iqlima Azhar[b]
[ab] Fakultas Ekonomi Universitas Samudra
Corresponding Author: ayurohanda08@gmail.com

Abstract

The research was conducted with the aim of determining the influence of capital expenditure, local original income and general allocation funds on the regional financial performance of Aceh Tamiang Regency. The data used is secondary data sourced from the budget realization report (LRA) of the Aceh Tamiang Regency government. The data analysis method uses a quantitative method with multiple linear regression equation analysis. The partial t test results of local original income are significant to financial performance, while capital expenditure and general allocation funds are partially insignificant to regional financial performance. The results of the F test or simultaneously capital expenditure, local original income and general allocation funds are significant to the financial performance of the Aceh Tamiang Regency Government.
Keywords: Capital Expenditure, Regional Original Revenue, General Allocation Fund and Regional Financial Performance

Abstrak

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran (LRA) pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.. Metode analisis data menggunakan metode kuantitatif dengan analisis persamaan regresi linier berganda, Hasil uji t secara parsial pendapatan asli daerah signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara belanja modal dan dana alokasi umum secara parsial tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil uji F atau secara simultan belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

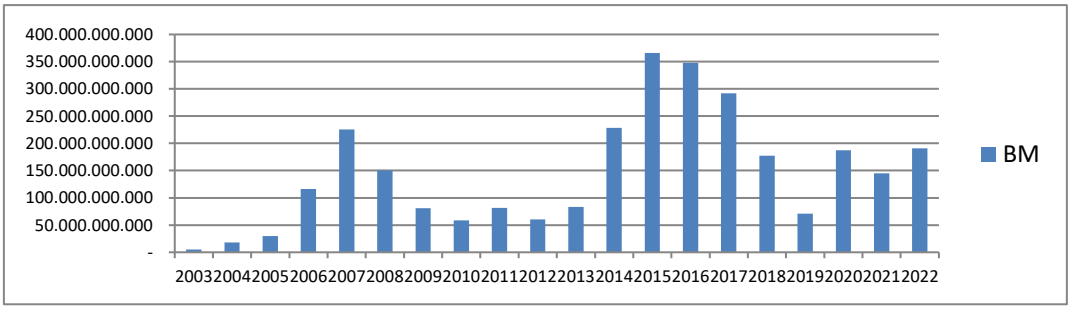
Diterapkannya kebijakan otonomi pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan (Mahsun, 2007). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Tahir, Mas'ud dan Plyriadi, 2019). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya sendiri dengan

optimal sehingga daerah tersebut akan memperoleh sumber penerimaan yang berasal dari daerah. Pendapatan daerah akan menunjukkan tingkat kemandiriannya dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat menggunakan sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Apabila pendapatan suatu daerah lebih besar dari pendapatan lainnya, maka akan semakin baik kinerja keuangannya (Nurkhayati, 2021)

Kinerja keuangan daerah diukur menggunpublik saat ini, hal tersebut karena menyangkut kesejahteraan umum (Zulkarnain dkk, 2020). Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan kewenangan daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Pradana, 2013). Kemudian terdapat pula dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumber pendapatan daearah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah, (Halim, 2012). Selain itu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah terdapat belanja modal yaitu belanja yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghasilkan aktiva tetap tertentu (Christy dan Adi, 2008).

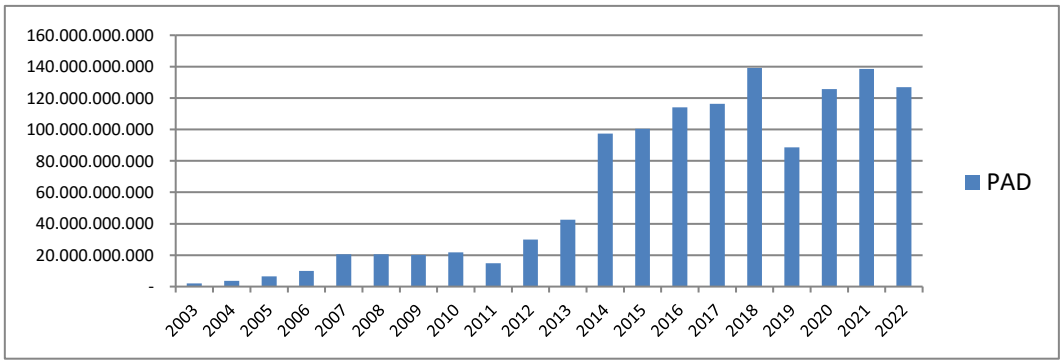
Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa belanja modal yang bila dilihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (Chrisnadwiheryanti, et.al, 2019). Kemudian pada penelitian Andirpa, et.al (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara pada penelitian Darmayanti (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Ratnawati (2016) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sementara penelitian yang dilakukan oleh Ariwibowo (2015) bahwa dana perimbangan yang didalamnya terdapat Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur yang dimekarkan pada tahun 2001 menjadi Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Pelaksanaan otonomi, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki belanja modal yang merupakan belanja langsung pada APBD digunakan untuk belanja barang dan jasa yang dapat menambah asset tetap atau kekayaan daerah yang manfaatnya melebihi satu periode anggaran. Potensi belanja modal dalam peranannya untuk meningkatkan pelayanan publik seharusnya menjadi alasan pemerintah daerah untuk menstruktur ulang anggaran belanja daerah yaitu memperbanyak proposi belanja modal dibandingkan belanja rutin. Data belanja modal pada Kabupaten Aceh Tamiang daapt dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Belanja Modal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003-2022

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa belanja modal di Kabupaten Aceh Tamiang mengalami fluktuasi seperti tahun 2018 menurun jumlahnya dari tahun sebelumnya menejadi sebesar Rp 196.195.484.209. kemudian belanja modal yang dianggarkan Rp 276.395.361.691 di tahun 2019 dan realisasi sebesar Rp 242.626.987.792 atau belum terealisasi 100% tetapi hanya 88% dan hal tersebut menunjukkan bahwa daerah belum cukup mampu menggunakan sepenuhnya belanja daerah. Kemudian pendapatan asli daerahnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

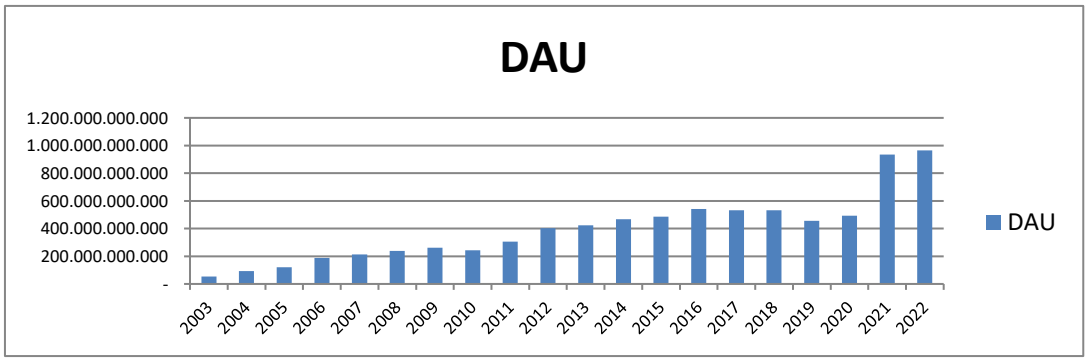


Gambar 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003-2022

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa PAD Kabupaten Aceh Tamiang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 PAD Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp 100.454.203.156, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp 114.051.092.363. namun, pada tahun 2017 PAD mengalami penurunan sebesar Rp 114.051.092.364. Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp. 139.261.841.911 dan mengalami penurunan tahun 2019 sebesar Rp 88.713.887.827. Bupati Aceh Tamiang dalam penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon anggaran sementara tahun 2019. Bupati menyampaikan target perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang akan mencapai Rp 139.026.126.375, (www.ajnn), tetapi kenyataannya pencapaian di tahun 2019 hanya sebesar Rp 134,313,085,808 atau tidak mencapai 100%.

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan, bahwa dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum,

dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Dana alokasi umum berdasarkan presentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan APBN. Sedangkan dana alokasi khusus adalah salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah. DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Kinerja keuangan daerah yang baik ditandai dengan semakin sedikitnya memperoleh dana perimbangan. Hal ini menunujukkan semakin mandirinya suatu daerah dalam menjalankan aktivitas pelayanan publik. Gambar 3 dapat dilihat data DAU dan DAK Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015-2019.



Gambar 3 Dana Alokasi Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003-2022

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus Kabupaten Aceh Tamiang. Dana alokasi umum cenderung mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Dana alokasi umum tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp 456.646.110.000 dan dana alokasi umum terendah pada tahun 2003 sebesar Rp 52.520.000.000. Bupati juga menyampaikan anggaran di tahun 2019 dari dana Alokasi Umum sebesar Rp 562.273.777.650, tetapi kenyataan yang terealisasi hanya sebesar Rp 456.646.110.000 (www.ajnn).

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Belanja Modal

Menurut Halim (2010), belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Indikator belanja modal berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal terdiri dari belanja tanah ditambah belanja peralatan dan mesin ditambah belanja gedung dan bangunan ditambah belanja jalan, irigasi dan jaringan ditambah dengan belanja asel lainnya.). Belanja modal digunakan pemerintah untuk menyediakan aset yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun. (Zulkarnain, Astuti dan Wiriani, 2019).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2010), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Sutrisno (2005), Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang bersumber dari potensi daerah didalamnya termasuk pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dana perimbangan dan pendapatan pemerintah daerah lainnya yang sah menurut undang-undang.

Dengan besarnya PAD suatu daerah, ini dapat memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah lebih kuat dibandingkan dengan yang memiliki PAD lebih rendah dan ini akan mengurangi tingkat ketergantungan dengan pemerintah di atasnya (jenjang pemerintah lebih tinggi). Menurut Mardiasmo (2019) bahwa pendapatan asli daerah memiliki indikator terdiri dari pajak daerah ditambah dengan retribusi daerah di tambah dengan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Menurut Halim (2010), sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
   a. Pajak Provinsi
   b. Pajak Kabupaten/ Kota
2. Retribusi Daerah, terdiri dari:
   a. Retribusi Jasa Umum
   b. Retribusi Jasa Usaha
   c. Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 290 (1) dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf b dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pada Pasal 290 (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarannya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 291 dasar penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Keuangan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Kinerja keuangan daerah adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013). Kinerja keuanga terus menjadi perhatian Menurut Halim (2010), analisis kinerja keuangan daerah adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan pemerintah daerah (Puspitasari, Adiputra dan Sulindawati, 2015). Kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan indikator tingkat desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Anggreni dan Artini (2019):

Rasio Kemandirian

$$\text{Tingkat desentralisasi fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \text{x } 100$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan metode kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data yang digunakan adalah laporan realisasi anggaran dari Pemerintah Kabuapten Aceh Tamiang melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah. Data yang digunakan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2022. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kemudian uji pra syarat regresi linier terdiri (uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi), selanjutnya uji regresi linier berganda dan uji

hipotesis (uji t, F dan R^2). Pengujian menggunakan aplikasi statistik *Statistical Pakcage for the Sosial Sciencces* (SPSS)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Data Penelitian

Deskriptif data penelitian merupakan bagian dari pemberian informasi data yang akan diteliti atau yang akan diolah. Pada penelitian ini sebagai variabel terikat kinerja keuangan atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian variabel bebas terdiri dari belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Berikut dapat diketahui deskripsi statistik variabel penelitian.

Tabel 1 Statistik deskriptif Kinerja Keuangan, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003-2022

Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan Daerah	20	1,80	12,00	6,7700	3,40048
Belanja Modal	20	9,70	11,60	11,0200	,46066
PAD	20	9,30	11,10	10,5250	,57571
DAU	20	10,70	12,00	11,5100	,32102
Valid N (listwise)	20				

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa untuk variabel kinerja keuangan dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2023 memiliki nilai terendah sebesar 1,80% dan nilai tertinggi sebesar 12.00% serta nilai rata-rata sebesar 6,77% sementara nilai standar deviasi sebesar 3,40%. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa nilai mean atau rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang menunjukkan bahwa sebaran data merata.

Berdasarkan tabel 1 juga diketahui bahwa untuk variabel belanja modal Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2023 memiliki nilai terendah sebesar 9,70 dan nilai tertinggi sebesar 11,60 serta nilai rata-rata sebesar 11,60 sementara nilai standar deviasi sebesar 0,46. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa nilai mean atau rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang menunjukkan bahwa sebaran data merata.

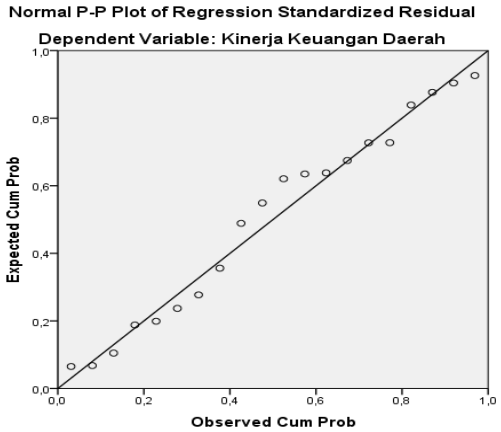
Berdasarkan tabel 1 juga diketahui bahwa untuk variabel pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2023 memiliki nilai terendah sebesar 9,30 dan nilai tertinggi sebesar 11,10 serta nilai rata-rata sebesar 10,52 sementara nilai standar deviasi sebesar 0,57. Dengan demikian dapat diketahui nilai mean atau rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang menunjukkan bahwa sebaran data merata.

Berdasarkan tabel 1 juga diketahui bahwa untuk variabel dana alokasi umum Kabupaten Aceh Tamiang sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2023 memiliki nilai terendah sebesar 10,70 dan nilai tertinggi sebesar 12,00 serta nilai rata-rata sebesar 11,51

sementara nilai standar deviasi sebesar 0,32. Dengan demikian dapat diketahui nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi dan menunjukkan sebaran data merata.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*.



Gambar 4 P-P Plot

Berdasarkan gambar 4 pengujian normalitas dengan menggunakan grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* diketahui bahwa titik-titik ploting penyebaran data masih berada pada garis diagonal, sehingga asumsi normalitas untuk nilai rsidual dalam analisi regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat terpenuhi.

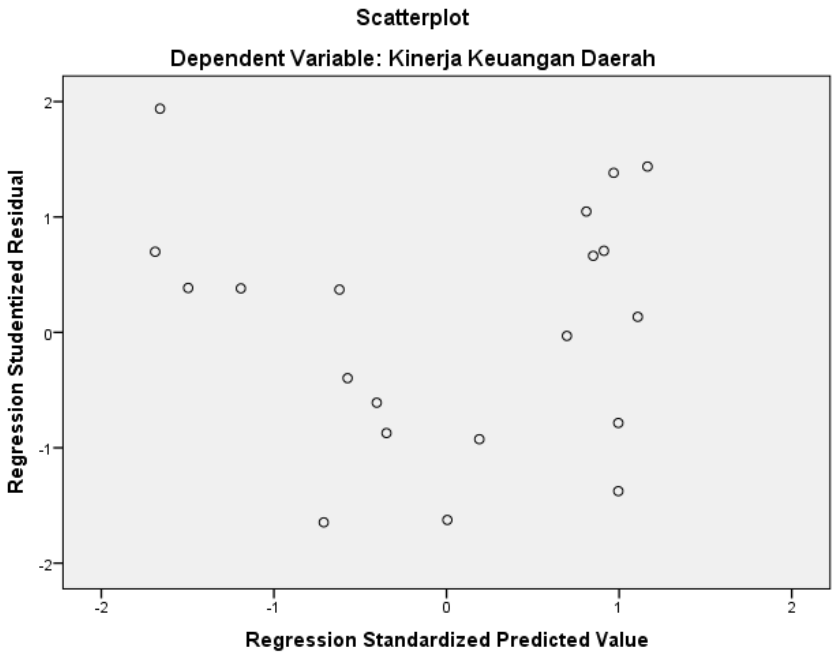
Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics		Asumsi
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Belanja Modal	,340	2,937	Tidak terjadi multikolinearitas
	PAD	,105	9,566	Tidak terjadi multikolinearitas
	DAU	,118	8,466	Tidak terjadi multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas, terdapat nilai tolerance > 0,1 dan nilai *variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel independen yang terdiri belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, tidak terdapat gejala multikolinieritas..

Uji Heterokedastisitas



Gambar 5 Grafik Scatterplots

Berdasarkan gambar 5 dapat diketahui scatterplot dengan titik-titik tidak membentuk satu kumpulan melainkan berpencar dan berada di antara titik 0 sumbu Y. berdasarkan gambar tersebut maka dapat dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas pada data penelitian.

Uji Autokorelasi

Uji autokerelasi asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 3 Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,954[a]	,910	,893	1,11412	1,827

Hasil uji autokorelasi diperoleh DW = 1,827 kemudian nilai dl = 0,99755 (diperoleh dari t = 20, k =4) , selanjutnya nilai du = 1,67634 dan nilai (4-dl) = 3,00245 serta nilai (4-du) = 2,32366, maka du < d < 4 – du, yaitu 1,67634 < 1,827 < 2,32366 berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan keputusan tidak ditolak.

Regresi Linier

Tabel 4. Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-31,211	14,810		-2,107	,051
	Belanja Modal	-1,826	,951	-,247	-1,920	,073
	PAD	7,837	1,373	1,327	5,708	,000
	DAU	-2,119	2,317	-,200	-,915	,374

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan

Berdasarkan tabel 4 regresi linier: $Y = -31,211 - 1,826X_1 + 7,837X_2 - 2,119X_3$

1. Konstanta sebesar -31,211 adalah nilai kinerja keuangan daerah pada saat variabel belanja modal, pendapatan asli dareah dan dana alokasi umum dianggap nol, maka kinerja keuangan daerah sebesar -31,211.
2. Koefisien regresi variabel belanja modal sebesar -1,826 dapat dinyatakan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah dan jika terjadi belanja modal meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan kinerja keuangan sebesar -1,826%, dengan asumsi variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, tetap atau tidak mengalami perubahan.
3. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah sebesar 7,837 dapat dinyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah dan jika terjadi kenaikan pada pendapatan asli daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 7,837%, dengan asumsi variabel belanja modal dan dana alokasi umum, tetap atau tidak mengalami perubahan.
4. Koefisien regresi variabel dana alokasi umum sebesar -2,119 dapat dinyatakan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah dan jika terjadi kenaikan dana alokasi umum sebesar 1% maka akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 2,119%, dengan asumsi variabel belanja modal dan pendapatan asli daerah, tetap atau tidak mengalami perubahan.

Hasil Uji F

Pengujian secara simultan dilakukan dengan membandingkan nilai F sig dan nilai α 5%.

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	199,842	3	66,614	53,666	,000[b]
	Residual	19,860	16	1,241		
	Total	219,702	19			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), DAU, Belanja Modal, PAD

Hasil perhitungan di atas bahwa F sig lebih kecil dari alpha 5% (0,000 < 0,05), maka secara simultan variabel belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil Uji t

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 4 dapat diketahui hasil uji t atau uji secara parsial.

1. Variabel belanja modal diperoleh t sig > α 5% (0,073>0,05) Ho diterima dan Ha ditolak, dan dapat dinyatakan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Variabel pendapatan asli daerah diperoleh t sig < α 5% (0,000<0,05) Ho ditolak dan Ha diterima, dan dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
3. Variabel dana alokasi umum diperoleh t sig > α 5% (0,374>0,05) Ho diterima dan Ha ditolak, dan dapat dinyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R^2*)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dapat menjelaskan variabel terikat (dependen). Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,954[a]	,910	,893	1,11412

a. Predictors: (Constant), DAU, Belanja Modal, PAD
b. Dependent Variable: Kinerja keungan daerah

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 6 diperoleh pada kolom *Adjusted R Square* (digunakan karena variabel bebas lebih dari 2 variabel) 0,893 atau 89,3%. Berdasarkan nilai koefisien determinasi maka dapat dinyatakan variabel belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dapat menjelaskan variabel kinerja keuangan daerah sebesar 89,3% dan sisanya sebesar 10,7% dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak diestimasi pada penelitian ini

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pernyataan hipotesis pertama, yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, dan hasil yang diperoleh bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, yang mana semakin meningkat belanja modal maka akan menurunkan kinerja keuangan. Besaran koefisien regresi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah adalah sebesar -1,826.

Nilai signifikan untuk belanja modal adalah sebesar 0,073 > 0,05. Hasil penelitian menunjukkan menerima hipotesis nol (H_0). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat belanja modal maka akan menurunkan kinerja keuangan.

Pengaruh negatif belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Aceh Tamiang disebabkan belanja modal yang dilakukan adalah belanja untuk pembelian pembangunan dan juga peralatan yang penggunaannya untuk kinerja yang lebih dari satu tahun. Kemudian kinerja keuangan yang dilihat pada penelitian ini adalah berdasarkan perkembangan dari pendapatan asli daerah, sementara belanja modal tidak langsung dapat menghasilkan pendapatan asli daerah, Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang didukung dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Anggreni dan Artini (2019) dimana variabel belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Chrisnadwiheryanti, Wahdahwati dan Suryono (2019), juga menemukan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pernyataan hipotesis kedua, yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, dan hasil yang diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, yang mana semakin meningkat pendapatan aslid aerah maka akan meningkatkan kinerja keuangan. Besaran koefisien regresi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah adalah sebesar 7,837. Nilai signifikan untuk pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,000 < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan menerima hipotesis alternatif (H_a). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah semakin tinggi maka semakin berhasil suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah salah satunya dalam pemanfaatan untuk pembangunan sehingga pelayanan dan kesejahteraan dapat meningkat. Pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah dan semakin besar perolehan maka semakin besar kemampuan daerah yang menunjukkan kinerja yang meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fisa Aprilia (2016) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Tahir, Mas'ud dan Plyriadi (2018), bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, demikian dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Antari dan Sedana (2018), bahwa pendapatan asli daerah berpegaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pernyataan hipotesis ketiga, yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, dan hasil

yang diperoleh bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, yang mana semakin meningkat dana alokasi umum maka akan menurunkan kinerja keuangan. Besaran koefisien regresi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah adalah sebesar -2,317. Nilai signifikan untuk dana alokasi umum adalah sebesar 0,374 > 0,05. Hasil penelitian menunjukkan menerima hipotesis nol (H_0). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat dana alokasi umum maka akan menurunkan kinerja keuangan daerah. Hal tersebut karena dana alokasi umum diperuntukkan untuk belanja pegawai, sehingga tidak dapat langsung mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tahir, Mas'ud dan Plyriadi (2018) menunjukkan bahwa dana perimbangan yang di dalamnya terdapat Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariwibowo (2015) bahwa dana perimbangan yang termasuk subnya dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Anggreni dan Artini (2019) bahwa dana alokasi umum tidak signifikan terhadap tingkat kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pernyataan hipotesis keempat, yang menyatakan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk H3, diterima. Nilai signifikan untuk belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berdasarkan hasil uji F dengan nilai F sig sebesar 0,000 < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan menerima hipotesis alternatif (H_a). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai dari ketiga variabel belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum maka akan semakin meningkat kinerja keuangan daerah.

Peningkatan dari belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama dapat meningkatkan kinerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Karena secara bersama-sama belanja modal dapat meningkatkan aset pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk mendukung setiap kegiatan pemerintah. Kemudian didukung dengan pendapatan asli daerah yang terus dapat ditingkatkan serta adanya dana alokasi umum yang diperuntukkan untuk pegawai yang dapat memberikan kesejahteraan kepada setiap pegawai. Hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah dan hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Andirfa, Basri dan Majid (2016), dimana belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian penelitian Putri dan Ratnawati (2016), dimana variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan pendaptan asli daerah berpengaruh positif terhadap terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten Aceh Tamiang.

. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengukur kinerja keuangan dapat menambahkan variabel lain seperti pinjaman daerah dan dana alokasi khusus.

REFERENSI

Andirfa,M., Basri, H., dan Majid, M.S.A, (2016), Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi*. Vol. 5. No. 3; 30-38.

Anggraeni, N.K.A, Artini Sri dan Gede Luh, (2019), Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Jurnal EJM UNUD*. Vol. 8. No. 3; 1315-1345

Antari, NPGS., dan Sedana, IBP, (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Udayana*. Vol. 7. No. 2; 1080-1110

Ariwibowo T., (2015), Pengaruh Dana Perimbangan dan belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Jasti*, Vol. 11. No. 2; 293-409

Armaja, Ibrahim Ridwan dan Aliamin, (2015), Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3. No. 2; 168-181

Arsa, M., (2012), *Keuangan Publik*. Media Pustaka. Jakarta.

Asnidar dan Hardi, N.S., (2019), Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*. Vol. 3. No. 1; 1-10

Chrisnadwiheryanti, Wahdahwati dan Suryono, (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Jira*. Vol. 8. No. 8; 1-12

Christy, Andrea, F., Adi, P.H., (2008), Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3 Rd National Conference UKWMS Surabaya, Oktober 10 Th 2009

Ghozali, Imam, (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul dan Abdullah Syukri, (2006), Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol 2 No. 1. Hal 53-64

Halim, Abdul, (2010), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta

Kuncoro, M, (2004), *Dasar-dasar Ekonomi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mahmudi. (2011). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Mashun, Mohammad, (2007), *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.

Nurkhayati, E.D, (2021), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbagnan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi*, Vol 2. No.1; 1-14

Petrie, Ratri, (2010), Analis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Jakarta

Putri dan E.D., dan Ratnawati Kusuma, (2016), Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4. No. 2; 1-14

Pradana, R. S. A., (2013), Pengaruh Pendapatan Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuagnan dan Belanja Modal (Studi Kasus di Pemerintah Proinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Bisnis*. Vol 3. No. 2; 1-15

Republik Indonesia, (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 *Tentang Dana Perimbangan*

Republik Indonesia., (2014), Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Bisnis***,** Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, (2017), *Statistika Penelitian***,** Bandung: Alfabeta.

Sukarni, N.W., dan Budiasih, I.G.A.N, (2020), Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi bali, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5. No. 3; 545-572

Suprapto, T, (2007), *Peran Manajemen dalam Komunikasi*, Jakarta, Buku Seru

Tahir, I., Mas'ud Masdar dan Plyriadi Annas, (2018), Faktor-faktor yang mempengarhi kinerja keuangan daerah pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Makasar, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2. No. 3; 61-70

Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Erni Wiriani, (2019), Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika, 3*(1), 65-73. https://doi.org/10.1234/jse.v3i1.1289

Zulkarnain, M., Astuti Y., Krisniawati dan Mukarramah, (2020), Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Jurnal Akuntabel, Vol 17 No 1, 62-69.